

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

China merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di dunia dan wilayah yang luas. Hal ini menjadi alasan munculnya keberagaman agama, budaya, dan bahasa di masing-masing wilayah China yang tersebar. Bangsa China menganggap bahwa mereka adalah pusat peradaban dunia. Dalam buku putih China disebutkan bahwa Tibet sejak pertengahan abad ke 13, resmi menjadi bagian dari wilayah Dinasti Yuan, namun pernyataan ini dipatahkan oleh para pemimpin Tibet, karena Tibet tidak pernah sekalipun membayar pajak atau administratif lainnya yang dapat membuktikan Tibet merupakan bagian dari China. Pemerintah China menganggap bahwa kontak individual dengan para Lama (Pemimpin Tibet) tersebut menunjukkan adanya otoritas Dinasti Ming terhadap Tibet. Tetapi ketika Tibet sudah tidak lagi dipimpin oleh para Lama itu, apapun sifat dari kontak tersebut, tidak berpengaruh sama sekali terhadap status independen Tibet.¹

Hal ini berarti Tibet tanpa pemerintahan Lama bukan lagi suatu wilayah yang merdeka atau bebas, sehingga China merasa berhak untuk mengatur dan menguasai Tibet sesuai dengan sistem pemerintahan China yang didominasi oleh kekuasaan komunis. Konflik antara China dan Tibet akhir-akhir ini menjadi perbincangan dan

isu utama di Dunia Internasional. Hal ini menjadi menarik untuk disimak karena terlebih konflik antara Tibet dan China ini mulai kembali mencuat menjadi isu internasional yang nampaknya akan mengundang banyak tanggapan dunia internasional. Hal ini menjadi sangat menarik karena isu ini kembali mencuat setelah China dipilih menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga bertaraf internasional yaitu Olimpiade Beijing 2008. China terus dibayangi dengan isu pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China kepada demonstran ProTibet (Lihat Lampiran pada Gambar III).

China dan Tibet yang sudah hampir 40 tahun mengalami konflik, hingga saat ini masih sulit menemukan jalan keluar untuk mencapai kesepakatan demi kedamaian bersama. Ada kisah menarik yang sering "diabaikan" yaitu suatu kenyataan yang pernah terjadi berabad-abad di Tibet, yaitu perbudakan. Bagaimana kaum elite, kaum tuan tanah, para Lama mengambil keuntungan-keuntungan dari manusia dengan kasta terendah ini, yang terjadi dalam sistem kebudayaan, kehidupan spiritual dan sejarah panjang perbudakan yang pernah terjadi di Tibet.

Beberapa alasan inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya dengan sebuah skripsi yang berjudul *Tindakan Represif Pemerintah China terhadap wilayah Tibet Dengan Migrasi Etnis Han dan Rekayasa Sosial*.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penulisan biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran obyektif

1. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Pemerintah China melakukan tindakan represif terhadap Budaya di wilayah Tibet.
2. Memberikan gambaran tentang konflik yang terjadi antara China dan Tibet khususnya dalam masalah budaya Tibet dengan migrasi Etnis Han China dan rekayasa sosial.
3. Mengetahui sejauh mana tindakan pemerintah China untuk memusnahkan Etnis asli Tibet kepemimpinan rejim Dalai Lama demi meyatukan Tibet kedalam wilayahnya kembali. Serta mengetahui tanggapan dunia internasional terhadap kasus ini.
4. Mengaplikasikan teori-teori yang penulis dapatkan selama proses belajar di perkuliahan.
5. Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Permasalahan

China merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dan populasi tertinggi di dunia. Keluasan wilayah China, serta keragaman suku dan populasi yang tinggi, menjadikan China sebagai negeri yang sulit menciptakan persatuan. Dibalik sejarah kedinastian China sendiri serta lamanya peradaban yang terjadi, tersembunyi suatu kenyataan yang semakin membuat China berbeda dengan negara Asia lainnya. China memiliki beberapa kelompok minoritas di antara

kebudayaan asli China, mulai dari Bahasa, serta identitas nasionalnya yang bermacam-macam, membuat daerah di perbatasan dan terpencil dari wilayahnya dengan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan semakin terlupakan.

Tibet dahulunya adalah sebuah kerajaan merdeka yang mengalami interaksi maupun benturan terutama secara politik dengan dinasti-dinasti yang ada di dataran China. Raja Tibet diberi gelar Dalai Lama dimana Dalai Lama yang sekarang, Tenzin Gyatso adalah Dalai Lama ke-14. Dalai Lama adalah pemimpin negara Tibet dan sekaligus pemimpin keagamaan. Tibet menjadi provinsi China pada tahun 1950 setelah tentara merah China menyerbu wilayah ini, dan berhasil menguasai ibu kota provinsi Tibet yaitu Lhasa dan mengusir Dalai Lama dari kekuasaannya. Pada tanggal 17 Maret 1959, Dalai Lama berhasil meloloskan diri dari penangkapan tentara China ke India oleh usaha pelarian yang dipimpin oleh Gampo Tashi, dan mendirikan semacam pemerintahan pelarian di Dharamsala, India utara sampai sekarang.

Jika dilihat dari sejarah China, Tibet merupakan wilayah kesatuan China (Lihat Lampiran pada Peta I dan II). Tibet menjadi sebuah wilayah yang penting, karena negeri ini berbatasan langsung dengan negara India yang di klaim sebagai negara “kontroversi” bagi China. Wilayah Tibet menjadi kunci keamanan diperbatasan dengan selatan. Secara ekonomi Tibet merupakan negeri miskin dan media seakan meyakinkan khalayak bahwa kemiskinan Tibet adalah akibat dari sikap diskriminatif pemerintah China. Padahal, kemiskinan Tibet adalah akibat

aristokrat dan para Dalai Lama hidup enak di istana, sedang kebanyakan rakyat menderita kekurangan. Tibet mulai mencuat menjadi sorotan masyarakat internasional.

Tibet yang dikenal mempunyai sejarah keunikan peradaban yang arif kembali menorehkan polemik yang cukup dramatis. Aksi para biksu Tibet dalam menggalang tuntutan terhadap China seakan mengulang kembali pemberontakan Tibet yang pernah bergolak di Tahun 1959. Sebagaimana yang telah santer diberitakan oleh berbagai media, sekurangnya 300 biarawan atau rahib berbaris di pusat kota Lhasa Tibet pada 10 Maret 2008 untuk menggelar aksi damai memperingati kegagalan pemerintah China menundukkan Tibet serta pengusiran Dalai Lama, Pemimpin Spiritual Buddha Tibet ke pengungsian di tahun 1959.²

Selama bertahun-tahun masalah Tibet nyaris terlupakan dan kehilangan sorotan internasional. Dalai Lama dan para pelarian di pemerintahan pengasingan terus menyerukan agar China memberikan kemerdekaan kepada Tibet. China sendiri yang tidak ingin terus terjadi perlawanan di Tibet pun memberikan hak otonomi khusus. Alasan lain pemberian otonomi khusus adalah karena mayoritas penduduk Tibet, seperti halnya juga daerah Mongolia Dalam, bukan berasal dari suku Han. 93% merupakan suku Tibet dan hanya 6% dari suku Han, itu pun berasal dari luar Tibet. Pada dekade 1980, China mengadakan reformasi Pintu Terbuka dan mulai melakukan pembangunan di Tibet. Masalah Tibet nyaris dianggap selesai ketika

Panchen Lama, pemimpin tertinggi kedua Tibet, menyatakan bergabung dengan China pada awal dekade tahun 2000-an.

Gejolak terjadi karena pemerintahan China bereaksi keras dengan menahan antara 50 hingga 60 rahib. Aksi tersebut berbuntut panjang, demonstrasi dan aksi massa pun meluas. Beijing mempertahankan keyakinan bahwa Tibet secara historis merupakan bagian dari China. Sementara itu, banyak orang Tibet beralasan bahwa wilayah Himalaya selama berabad-abad adalah wilayah merdeka. Dibalik konfrontasi Tibet untuk melepaskan diri dari pemerintah China ternyata menyimpan berbagai fakta terselubung.

Belum pernah Isu Tibet begitu mencuat dan menjadi isu hangat dunia internasional. Ada yang bersimpati, ada yang netral, namun ada pula yang sangat keras terhadap China. China mencoba mengubah sikap rakyat Tibet akan tetapi hal itu sulit untuk dilakukan. Kebijakan politik penempatan warga China di Tibet diambil sebagai satu-satunya penyelesaian. Jika tidak dapat membuat mereka menjadi orang China, maka warga China-lah yang ditempatkan di Tibet. Melalui kebijakan itu warga Tibet menjadi penduduk minoritas yang termarginal. China beranggapan masalah dapat diselesaikan melalui langkah itu.

D. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan suatu pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu *Faktor-faktor apa yang menyebabkan Pemerintah China melakukan tindakan represif terhadap wilayah Tibet?*

E. Kerangka Teori

KONSEP *NATION BUILDING*

Nation building dipahami sebagai proses konsolidasi dan integrasi dari kelompok-kelompok pembentuk negara sehingga tidak mudah terpecah-pecah baik dari luar maupun dari dalam.³ *Nation Building* berhubungan erat dengan Etnis (*nation*) dalam satuan wilayah teritorial yang kemudian disebut negara, sehingga kuat lemahnya *nation building* tersebut tergantung pada bagaimana etnis-etnis didalamnya berinteraksi baik berkonflik ataupun berkerjasama.⁴ Sehingga proses *nation building* melalui integrasi dapat berjalan dan dapat dikatakan sebagai proses yang tak pernah selesai karena menyangkut keamanan negara.

Keanekaragaman ini disisi lain membawa keunggulan tersendiri yang turut membentuk identitas nasional sebagai modal dasar pembangunan termasuk dalam berinteraksi dengan negara lain. Ketidakstabilan ini lebih karena upaya kelompok dalam mengakomodasikan kepentingannya. Berbagai kepentingan tersebut menyangkut segala hal kebutuhan kelompok dalam mempertahankan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat.

Upaya pengakomodasian kepentingan dari berbagai kebutuhan ini bukan hanya berhadapan dengan elit namun juga berhadapan dengan kepentingan kelompok lain dengan upaya yang sama. Dapat dikatakan persinggungan kepentingan yang tidak terakomodasikan dengan baik akan mengakibatkan terjadinya konflik. Konflik ini terkadang tidak dapat dihindari meskipun pemerintahan suatu negara selalu berusaha untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan warganya dalam kerangka besar kepentingan nasional yang di dalamnya termasuk *nation building*.

Konflik ini pula yang berpotensi menjadi ancaman terhadap integritas nasional. Lemahnya derajat integrasi nasional akan menyebabkan jarum spektrum *nation building* yang pada sejarah suatu negara bangsa telah mencapai pada titik kematangan (*mature*), mengalami pergeseran kearah ketidak matangan (*immature*). Pergeseran kearah negatif ini tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat atau warga negara selaku modal utama dalam *nation building*. Peranan pemimpin atau pemerintah juga sangat berpengaruh dalam pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam integrasi nasional.

Menurut pakar politik Morgenthau, Kepentingan Nasional (*National Interest*) merupakan pilar yang utama tentang teori politik internasional dan politik luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara yaitu mengejar

pengendalian suatu negara atas negara lain.⁵ Tentunya hubungan kekuasaan atas kekuasaan dan pengendalian dapat dilakukan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. adapun kepentingan nasional suatu negara dapat meliputi integritas teritorial suatu negara, kedaulatan, dan *prestige*.

Nation Building seharusnya menjadi suatu proses terpenting dalam mengkonsolidasi kemerdekaan dan keutuhan bagi China adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, termasuk Tibet. Dengan begitu tentunya, diskriminasi rasial tidak akan bisa dilegitimasi, karena setiap warga negara China tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kewarganegaraan China tidak mengenal asal usul keturunan, agama dan status sosial-nya. Namun dalam persoalan Tibet, isu dan masalah yang berkembang juga berbeda.

Dalai Lama menggunakan istilah 'Genosida budaya' Tibet dengan melihat pada aksi Pemerintah China yang mendorong masukkan Etnis Han, dari China bagian lain, ke Tibet. Selain itu, Etnis Tibet juga makin terpinggirkan dari pembangunan ekonomi di Tibet. Namun faktor kenyataan internasional, dengan tidak ada satu negara dan pemerintahan di dunia ini yang mempertentangkan status Tibet dan mengakuinya sebagai bagian dari China, dan bersedia untuk memberikan pengakuan legal apa pun kepada Dalai Lama yang berada dalam pemerintahan pengasingan di Dharamsala, wilayah India yang berbatasan dengan Tibet.

⁵ *Journal of International Law, International: Dilemma dan Metodologi* hal 140/1990

KONSEP OTORITERISME

Otoriterisme menurut Guillermo O'Donnel, dapat berarti Pemerintah yang dipegang oleh militer bukan sebagai diktator melainkan sebagai suatu lembaga, berkolaborasi dengan teknokrat sipil dan masyarakat bisnis internasional, Pengambilan keputusan dalam rezim otoriterisme-birokratis bersifat birokratik-teknokratik, sebagai lawan pendekatan politik dalam pembuatan kebijaksanaan yang memerlukan suatu proses tawar-menawar yang lama diantara berbagai kelompok kepentingan dengan demobilisasi massa melalui tindakan-tindakan represif.⁶

Suatu pemerintahan otoriter dan terbiasa dengan gaya sistem kepemimpinan yang otoriter hanya saja pembangunan yang dikatakan berhasil pada saat bersamaan juga telah mengorbankan hak asasi manusia (HAM), demokrasi dan negara hukum yang semuanya seringkali diterlantarkan karena sistem otoriter berkaitan dengan sistem budaya, sosial dan politik di China. Sistem otoriter yang berlaku tidak memberi kesempatan untuk keterbukaan, kebebasan, dan dialog yang tulus.

Persoalan cenderung diselesaikan lewat represi dan kekerasan-kekerasan yang melanggar hak asasi serta mengasingkan rakyat di daerah dari kebersamaan dan persaudaraan. Sistem, kebijakan, budaya dan

⁶ Lutfiwahyudi, "Netralitas Birokrasi", 16 Maret 2007 di <http://www.kompas.com>

pendekatan serba represif, serta tidak adil itulah yang biasanya tinggalkan melalui reformasi yang telah diberi legitimasi lewat pemilihan umum yang demokratis. Itulah mengapa konsep itu tanpa disadari tetap bertahan dan berlaku dengan kenyataan bahwa pada situasi tertentu konsep otoriterisme mengungkapkan itikad yang cukup populer dan dalam semua masyarakat terdapat berbagai situasi dimana kebebasan bisa jadi bertentangan dengan kepentingan negara atau masyarakat misalnya dalam suasana kekacauan seperti yang terjadi dalam masalah China dan Tibet.

F. Hipotesis

Faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah China melakukan tindakan represif di wilayah Tibet yaitu disebabkan oleh dua faktor antara lain:

- 1) Integritas Teritorial China atas wilayah Tibet
- 2) Kedaulatan Negara China terhadap wilayah Tibet

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian dalam penulisan skripsi ini ditekankan pada konflik China dan Tibet antara tahun 1959-2008. Sejak Partai Komunis China masuk dan berkuasa, Pemerintah China selalu bersikap anti-agama. Berbagai strategi telah disusun untuk mencegah berkembangnya agama termasuk dengan Dalai Lama. Namun berbagai hal yang menjadi latar belakang bagi peristiwa-peristiwa yang akan

penelitian untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu luas dan memudahkan seleksi data.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian pustaka (Library Research) dengan perolehan data sekunder yang bersumber dari majalah, buku-buku, jurnal, surat kabar, website online, dan dokumen pustaka lainnya.

L. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisi antara lain mengenai alasan pemilihan judul, apa yang menjadi latar belakang masalah, tujuan penulisan, perumusan masalah, teori yang digunakan, hipotesa yang diajukan, jangkauan penelitian, dan metode pengumpulan data.

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG KONFLIK CHINA DAN TIBET

Bab ini menjelaskan tentang konflik antara China dan Tibet, tentang

Umum Konflik China dan Tibet, Sejarah Awal Tibet Dibawah Kendali China, Keberagaman Etnis dan Budaya, Kebijakan Pemerintah China Terhadap Etnis di China dan Otonomi Khusus Tibet, serta Munculnya Pergolakan dan Tindakan Represif China di wilayah Tibet.

BAB III. TIBET DIBAWAH KEKUASAN PEMERINTAH CHINA

Bab Tiga ini menjelaskan tentang kondisi Tibet dibawah kekuasaan pemerintah China sejak masuknya kekuatan Komunis tahun 1959, tindakan represif pemerintah China terhadap budaya Tibet dengan menyingkirkan etnis asli Tibet, Perlawanan oleh rakyat Tibet, dan Dukungan Internasional terhadap Penyelesaian masalah China dan Tibet.

BAB IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMERINTAH CHINA MELAKUKAN TINDAKAN REPRESIF DI WILAYAH TIBET

Bab Empat ini akan menjelaskan tentang bagaimana faktor-faktor apa yang menyebabkan pemerintah China melakukan tindakan represif terhadap budaya Tibet dengan melihat dua faktor yaitu Integritas Teritorial China atas wilayah Tibet, dan Kedaulatan China terhadap wilayah Tibet.

BAB V. KESIMPULAN

Bab Lima ini berisi kesimpulan dari bab satu hingga bab empat yang